BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2. 1. Penelitian Terdahulu

Studi yang berkaitan dengan politik identitas masih sangatlah terbatas. Sebaliknya, kajian politik dinasti sudah begitu dikenal luas. Namun, secara substansial, politik identitas dan politik dinasti memiliki kajian yang sama, yakni menyoroti peran struktur politik dalam satu hubungan darah. Kaitan dengan itu, penelitian terdahulu mengenai studi politik identitas, dapat dilihat pada beberapa studi berikut ini.

Longgina Novadona Bayo memaparkan hadirnya kekuatan marga sebagai solidaritas instrumental dalam proses berpolitik dan berpemerintahan di Gorontalo. Jejaring kekerabatan marga (praktik familisme) memengaruhi penguasa dan elit politik lokal dalam menjalankan kekuasaannya di wilayah tersebut. Menguatnya praktik politik marga dalam politik dan pemerintahan lokal di Gorontalo tersebut, menurut Bayo, karena familisme atau praktik politik berbasis marga dianggap melahirkan ketidaksetaraan yang bertentangan dengan demokrasi yang sangat mengagungkan nilai kesetaraan politik. Namun, studi Bayo juga menemukan bahwa pengalaman politik marga di Gorontalo justru menampilkan relevansi politik marga yang dapat terus bekerja dan bertahan dalam rezim yang demokratik (Longgina

Novadona Bayo, Purwo Santoso, 2018)

Sementara itu, Agus Sutisna melalui artikelnya dengan judul : "Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah" menjelaskan, bahwa sejak Banten terpisah dari Provinsi Jawa Barat, kehidupan politik begitu menguat, ditandai dengan gejala dinasti politik atau politik kekerabatan, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Pada level provinsi, *the local strongman* begitu mendominasi, dengan Tb. Chasan Sochib dalam kepolitikan Banten demikian menonjol, yang berhasil menempatkan anaknya Ratu Atut Chosiyah pada jabatan gubernur selama kurang lebih dua periode (2006-2011 dan 2011-2014). Studi Agus Sutisna ini bertujuan mengetahui serta menjelaskan mekanisme praktik dinasti politik atau politik kekerabatan di Banten era kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah yang mengalami proliferasi (persebaran, pertumbuhan) pada berbagai arena kehidupan masyarakat (Sutisna, 2017).

Selanjutnya, Abu Bakar melalui tulisannya berjudul : Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik; Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar menjelaskan pelembagaan partai politik di tingkat lokal dan masalah politik kekerabatan yang terjadi di dalam partai politik, juga proses rekruitmen kandidat yang berjalan secara eksklusif dalam pengalaman DPC PDIP Kabupaten Kepulauan Selayar (Bakar, 2013).

Andi Faisal Bakti menganalisis tentang kekuasaan Puang yang begitu

berpengaruh di Kabupaten Wajo. Pengalaman dan karir seorang Puang selama Orde Baru memberikan peluang bagi mereka menciptakan ruang dan modal sosial yang maksimal. Ketika desentralisasi terbuka luas, peluang dan modal sosial yang telah terbangun dapat dimanfaatkan oleh keluarga Puang. Tetapi kemudian di kemudian hari, kekuasaan Puang yang diperoleh justru digunakan membangun kekuatan politik dinasti (Bakti, 2007).

Pembeda riset ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan fokus pada tindakan elit/aktor dalam relasi kuasa jaringan politik identitas serta pengaruh dari relasi kuasa itu pada elit/aktor yang bersangkutan. Penelitian ini juga lebih memfokuskan pada relasi kuasa jaringan politik identitas dalam kaitannya dalam institusi politik dan birokrasi.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Praktik Politik Identitas di Indonesia

Menurut Lukmantoro, secara teoritis, politik identitas merupakan politik yang mengedepankan kepentingan anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik yang berbasis pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Adapun rumusan lain dari politik identitas yakni politik perbedaan. Politik identitas lebih sebagai tindakan politis dalam upaya menyalurkan aspirasi, dan suatu kebijakan dipengaruhi, penguasaan dan pendistribusian nilai-nilai berharga, sampai pada suatu tuntutan mendasar, yakni penentuan nasib sendiri berdasarkan primordial. Etnisitas dalam format

politik identitas, lebih dicerminkan sebagai upaya memasukan nilai dalam PERDA (Peraturan Daerah), wilayah pemerintahan yang dipisahkan, keinginan memperoleh otonomi khusus hingga munculnya gerakan untuk memisahkan wilayah (separatis). Adapun dalam konteks keagamaan, politik identitas lebih sebagai refleksi atas keragaman usaha dengan memberi masukan nilai keagamaan pada pembuatan kebijakan, termasuk ramainya gejala Perda Syariah, dan upaya melahirkan sebuah kota yang memiliki identitas pada agama tertentu.

Sementara Cressida Heyes memberi pandangan dan definisi politik identitas sebagai suatu penandaan aktivitas politis (Cressida Heyes, 2007). Adapun dalam pengertian lebih luas, politik identitas berkepentingan terhadap pembebasan atas situasi keterkungkungan serta terpinggirkan yang secara khusus meliputi konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks lebih luas.

Bila dicermati, politik identitas pada dasarnya merupakan nama lain dari biopolitik. Yang mengidentikkan dan membicarakan satu kelompok berdasarkan karakteristik biologis atau tujuan biologisnya atas titik pandang yang tunggal. Contohnya, politik ras dan politik gender. (Hellner, 1994:4).

Dalam pemikiran Agnes Heller, politik identitas lebih sebagai gerakan politik dengan memusatkan perhatiannya pada satu perbedaan utama kategori politik. Dengan kesadaran individu, politik identitas hadir untuk menjabarkan

partikularitas identitas ke dalam bentuk relasi yang terdapat dalam identitas agama maupun identitas primordial etnik.

Berikutnya, pada politik identitas terjadi pengambilalihan yang kemudian dirangkul lewat kelompok mayoritas sebagai upaya memberi penguatan dominasi atas kekuasaan. Digunakannya politik identitas dalam merebut kekuasaan, sebaliknya makin mengentalkan adanya perbedaan yang mendorong lahirnya pertikaian bahkan konflik. Hal ini bukan berarti tak adanya kritik pedas. Politik identitas sekan menguatkan kekompakan yang sifatnya esensial tentang eksistensi pada komunitas tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Mengenai ini, Agnes Heller selanjutnya, memberikan definisi bahwa politik identitas merupakan suatu konsep dan gerakan politik yang perhatiannya lebih dipusatkan pada perbedaan (diferensiasi) sebagai kategori politik utama (Abdillah S, 2002: 16). Pada tiap komunitas, walaupun memiliki ideologi serta tujuan bersama, tak dipungkiri, di dalamnya ada keragaman individu di mana masing-masing mengandung kepribadian dan identitas.

Secara umum, pada teori politik identitas dalam pelbagai hasil penelitian, memperlihatkan dua faktor pokok yang menjadikan etnis dan agama demikian menarik dan dihadirkan guna digunakan serta memberikan pengaruh di dalam setiap proses politik.

Pertama, tatkala faktor etnis dan agama menjadi taruhan. Terdapat

semacam keperluan guna dipertahankan atau dibelanya identitas yang dimiliki suatu kelompok. *Kedua*, tatkala proses politik secara kompetitif dilangsungkan. Ini berarti, melalui proses politik tersebut mengakibatkan antar kelompok identitas berhadap-hadapan dan tak ada yang dominan. Dengan begitu, tak jelas siapa yang memenangkan sejak awal. Pemilihan umum, termasuk Pemilukada, merupakan suatu proses politik yang mempertaruhkan berbagai faktor, termasuk identitas. Sekarang, apakah aktor yang di dalamnya ikut terlibat mampu mengelola isu (seperti) agama dan etnis, menjadi sesuatu yang dapat dipertaruhkan.

Dalam setiap etnis, terdapat politik identitas sebagai suatu ideologi; keberadaannya bersifat laten dan potensial, sekali-kali dapat hadir ke permukaan sebagai kekuatan politik dominan. Politik identitas secara empiris, merupakan partisipasi politik yang dikonstruk dan diaktualisasikan melalui akar budaya lokal di mana masyarakat tempatan berada, serta mengalami secara terus-menerus proses internalisasi dalam kebudayaan masyarakat melalui interaksi sosial yang dijalin (Buchari, 2014).

Castells melalui pemikirannya, menyatakan politik identitas lebih sebagai partisipasi individual dalam kehidupan sosial di mana budaya dan psikologi seseorang lebih menentukan. Identitas merupakan suatu proses konstruksi dasar budaya dan psiko-kultural dari seorang individu yang memberi arti serta tujuan hidup pada individu tersebut. Ini karena, suatu

identitas yang terbentuk merupakan suatu proses dari dialog internal serta interaksi sosial (Buchari, 2014).

Sejalan di atas, ditambahkan Castells, dalam dunia dengan pusaran arus kekuasaan, kekayaan, serta imajinasi dengan skala global, pencarian identitas, baik kolektif maupun individual menjadi sumber mendasar atas suatu pemaknaan. Pencarian identitas dan makna bukanlah sesuatu yang baru, sebab identitas, khususnya berbasis pada agama dan etnis menjadi akar atas makna hidup manusia sejak ia dilahirkan di bumi. Tetapi, di dalam periodisasi sejarah, ditandai adanya destrukturisasi organisasi serta delegitimasi institusi, yang telah menghilangkan gerakan sosial yang berdampak besar.

Sekalipun bukanlah satu-satunya, namun identitas merupakan sumber makna utama. Orang semakin mengatur, mereka menata makna hidup bukan pada apa yang dilakukan di sekitarnya, tetapi, basisnya lebih pada apa yang mereka percayai. Selanjutnya, jaring global atas instrumental yang dipertukarkan secara selektif atas mati hidupnya individu, kelompok, wilayah dan bahkan negara, sejalan dan relevan untuk memenuhi tujuan mereka yang diproses di dalam logika jaringan tersebut (Munandar, 2013).

Selanjutnya Castells menyatakan, dasar identitas itu dikonstruk berdasarkan material bangunan sejarah, biologi, geografi, produksi, dan reproduksi institusi, fantasi pribadi, kolektivitas memori, aparatus kekuasaan, serta ajaran agama. Permasalahannya, bagaimanakah seorang individu atau

sekelompok orang dapat mengonstruksikan kembali bangunan identitas itu, lalu siapa lebih memiliki peran untuk menentukan arah bangunan identitas tersebut dan seperti apa manfaatnya? Kaitan dengan hal ini, Castells lalu membagi konsep identitas itu dalam beberapa bagian :

1. Identitas legitimasi (*legitimizing identity*); suatu identitas yang diperkenalkan oleh institusi yang mendominasi suatu masyarakat guna dirasionalisasikan serta dilanjutkan dominasinya atas aktor sosial, seperti institusi negara yang meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut kemudian mendapatkan legitimasi untuk hal tersebut dilakukan.

2. Identitas resisten (*resistance identity*); merupakan proses pembentukan identitas yang dilakukan aktor sosial dalam kondisi tertekan yang disebabkan adanya dominasi dan stereotipe atau penilaian pihak lain yang menghadirkan resistensi serta pemunculan identitas lain dari pihak yang mendominasi dengan tujuan untuk keberlanjutan hidup kelompok atau golongannya.

3. Identitas proyek (*project identity*); merupakan identitas manakala identitas baru dibentuk aktor sosial yang membuat ketentuan takaran baru sekaligus mampu melakukan transformasi struktur masyarakat secara keseluruhan (Munandar, 2013).

Sejalan dengan apa yang disampaikan di atas, Francis Fukuyama menjelaskan, bahwa konsep modern tentang identitas menyatukan tiga fenomena berbeda. *Pertama*, *thymos*, aspek universal dari kepribadian manusia yang sangat membutuhkan pengakuan. *Kedua*, perbedaan antara diri batiniah dan lahiriah dan meningkatnya valuasi moral dari diri batiniah di atas masyarakat. *Ketiga*, konsep martabat, ketika pengakuan tidak hanya untuk kelas orang tertentu tetapi untuk semua orang. Pelebaran dan universalisasi martabat mengubah pencarian diri menjadi proyek politik. (Fukayama, 2020 : 44).

Menurut Fukuyama, identitas tidak ditentukan secara biologis, sekalipun dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan, identitas dapat didefinisikan dalam istilah yang terfokus atau meluas. *Bahwa saya dilahirkan dengan cara tertentu tidak berarti saya harus berfikir dengan cara tertentu, pengalaman hidup pada akhirnya dapat diterjemahkan ke dalam pengalaman bersama*. (Fukuyama, 2020 : 145)

Dalam pandangan Fukuyama, siapapun tak dapat melepaskan diri dari politik identitas. Fukuyama menjelaskan, “kita tidak bisa melepaskan diri dari identitas atau politik identitas. Identitas merupakan "gagasan moral yang kuat yang datang pada kita” (Fukuyama, 2020 : 187).

2.2.2. Fungsi Modal Sosial dalam Praktik Politik di Indonesia

Modal sosial oleh banyak pakar sosiologi, paling tidak seperti Bourdieu (1986), Putnam (1993), Coleman (1988), dan Lawang (2004), dilihat sebagai modal yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat, yang muncul dari interaksi individu dalam upaya bermasyarakat, untuk berkomitment satu sama lain dan menciptakan tatanan sosial untuk mencapai sebuah tujuan bersama.

Sehingga modal sosial akan menjadi kekuatan sosial jika ada kontruksi sosial yang terbentuk dari interaksi sosial antar individu- individu, baik terbatas pada komunitas itu saja (*bounding social capital*) maupun dengan komunitas di aras yang lebih luas dari kelompok terbatas (*bridging social capital*). Modal sosial dalam pengertian ini merupakan alat yang dikonstruksikan oleh individu-individu dalam sebuah kelembagaan jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

Modal sosial oleh Bourdieu didefinisikan sebagai sumber daya aktual yang potensial dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (keanggotaan dalam kelompok sosial). Modal sosial memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif, termasuk didalamnya pelembagaan jaringan sosial juga menjadi penentu tindakan sosial dari aktor. Coleman mendefinisikan modal sosial lebih pada gambaran sebuah

institusi formal yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, ada bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat melahirkan kontrak sosial.

Sementara Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antar anggota masyarakat maupun masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks* (*networks of civic engagement*) atau ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Putnam juga berpendapat bahwa tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan) yang diharapkan melainkan juga *undesirable outcome* (hasil yang tidak terduga).

Lawang, menegaskan bahwa kekuatan sosial menunjuk pada semua mekanisme yang sudah dan dikembangkan oleh komunitas dalam mempertahankan hidupnya. Pengertian komunitas dapat mengacu pada

komunitas mikro, mezo dan makro. Kekuatan-kekuatan sosial sebagai modal sosial dapat terbatas pada komunitas itu saja yang dilihat sebagai *bounded social capital* atau jika sudah dikaitkan dalam bentuk jaringan dengan modal sosial meso dan makro dapat disebut sebagai *bridging social capital*. Kalau satuan pengamatan dan analisisnya adalah meso sebagai *bounded* maka yang makro adalah *bridging*.

Dalam pemikiran Lawang, modal sosial pada dasarnya merupakan konstruksi sosial untuk mengatasi masalah sosial yang dibangun melalui interaksi sosial antar individu-individu sehingga terbentuklah kekuatan sosial kolektif. Sehingga modal sosial dalam pengertian ini merupakan alat yang dikonstruksi oleh aktor-aktor untuk mencapai tujuan bersama. Kemungkinan modal sosial bisa menjadi dominan dalam mengatasi suatu masalah sosial bisa saja menjadi penting tetapi mungkin juga tidak seberapa penting. Namun prinsip sinergi diantara berbagai kepentingan aktor menurut Lawang tetap berlaku, agar modal sosial dapat digunakan sebagai kekuatan sosial untuk mencapai tujuan bersama.

Kekuatan sosial yang didapat dari kelembagaan jaringan bisa menjadi kekuatan yang sangat besar karena dalam berbagai kasus jaringan ini tidak akan terbatas pada jaringan bounding tetapi juga akan meluas dan bahkan bisa menjadi sebuah gerakan *social society*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Diani dan McAdam (2003). Mereka mengemukakan bahwa jaringan

memudahkan untuk memperluas jaringan tersebut dalam rangka membangun gerakan sosial yang pada akhirnya dapat mendorong aksi kolektif. Bahkan meskipun individu yang terlibat dalam aksi kolektif tersebut tidak mempunyai hubungan dengan para aktor maupun jaringan sosial yang memiliki peran kuat, namun melalui penyebaran isu oleh anggota jaringan dapat mempermudah perluasan aksi kolektif.

Dalam kehidupan masyarakat, jejaring sosial tidak hanya terdiri dari civil society organizations, namun melibatkan partai politik, lembaga-lembaga agama dan sosial, pranata adat, dan aktor-aktor individu seperti para informal tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, dll. Dengan keterlibatan yang unsur yang bervariasi dari jaringan, aspek politik menjadi menonjol. Artinya ada kepentingan yang melekat dari perakitan jaringan. Kepentingan ini bisa positif atau negatif tergantung dari sudut pandangnya, apakah dari dalam jaringan atau luar jaringan. Dengan demikian peran jaringan bisa terjadi dalam hal negatif (konflik) maupun positif (rekonsiliasi).

Pemenuhan kepentingan bersama terjadi dalam masyarakat dengan melakukan kerjasama sosial. Modal sosial tersebut mempererat hubungan antar anggota masyarakat serta menjadikannya hubungan yang harmonis sehingga lebih mudah dalam menangani permasahan sosial yang ada. Penanganan permasalah sosial yang ada ini menjadikan masyarakat mudah dalam mencapai apa yang diinginkan bersama.

Keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial didalam modal sosial merujuk pada bagian organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi dalam masyarakat. Modal sosial dapat juga merujuk pada institusi hubungan sikap dan nilai yang membimbing interaksi konstribusi pada perkembangan konflik dan rekonsiliasi.

Upaya rekonsiliasi paska kerusuhan merupakan bagian yang penting agar konflik komunal tidak berlarut-larut. Upaya rekonsiliasi bisa datang dari inisiatif pemerintah maupun masyarakat. Dikalangan studi tentang perdamaian, ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya rekonsiliasi. Pendekatan yang lasim digunakan adalah dengan membangun pola-pola hubungan atau interaksi antara negara dan masyarakat di daerah-daerah konflik, antar masyarakat yang bertikai, termasuk bagaimana pola hubungan antar keduanya muncul dalam proses kelahiran suatu kebijakan dan atau konsep dalam rangka resolusi konflik. Selain pendekatan militer, mengisolir konflik, memisahkan antara pihak yang bertikai, dan negosiasi atau dialog dengan sifat elitis.

Dalam satu segi, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan kewajiban pemerintah selaku penjaga stabilitas negara, dengan pengakhiran sementara konflik. Akan tetapi apakah bisa benar-benar menyelesaikan akar persoalan konflik dan menjamin tidak

akan terulangnya konflik komunal? Sebagian literatur mengatakan pendekatan pemerintah yang demikian tidak bisa menyentuh akar persoalan dan hanya dipermukaan saja karena sifatnya yang elitis dalam melakukan dialog. Kehadiran tokoh dianggap mewakili kelompok yang bertikai, padahal dalam kelompok ada banyak aktor yang memegang peranan dan memiliki kepentingan yang berbeda.

Menurut Bourdieu (dalam Hasibuan 2004) modal sosial adalah keseluruhan sumber daya aktual dan potensi sekaligus, terkait dengan hubungan kelembagaan yang tetap berpangkal pada saling kenal dan saling mengakui. Anggota kelompok menerima dukungan secara penuh. Tentang besar kecilnya modal sosial yang dimiliki seseorang dalam komunitas tertentu, memang sangat tergantung pada berapa besar jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tidak seperti modal fisik, ekonomi dan modal manusia, modal sosial tidak memberikan hasil seketika dan berjangka pendek. Namun manakalah modal sosial bisa dirawat dan diakui bersama sebagai salah satu kekuatan penopang dalam mendorong perubahan dan kemajuan di masyarakat kita, dan memberi manfaat pada tahap selanjutnya. Modal sosial juga bermanfaat pada seseorang untuk memudahkan dalam melakukan tindakan dalam situasi tertentu.

Bagi Putnam, (Field 1996:56) modal sosial adalah bagian dari

kehidupan sosial, jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimilki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 2002: xii).

Menurut Hasbullah 2006, unsur-unsur pokok modal sosial adalah :

a) Partisipasi dalam suatu jaringan

Kemampuan orang atau individu atau anggota-anggota komunitas untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk membangun modal sosial. Manusia mempunyai kebebasan untuk bersikap, berperilaku dan menentukan dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. Pada saat seseorang meleburkan diri dalam jaringan sosial dan menyinergiskan kekuatannya maka secara langsung maupun tidak, ia telah menambahkan kekuatan ke dalam jaringan tersebut. Sebaliknya, dengan menjadi bagian aktif dalam suatu jaringan, seseorang akan memperoleh kekuatan tambahan dari jaringan tersebut.

b) Hubungan Timbal Balik (*Reciprocity*)

Modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling bertukar kebaikan di antara individu-individu yang menjadi bagian atau anggota

jaringan. Hubungan timbal balik ini juga dapat diasumsikan sebagai saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Modal sosial tidak hanya didapati pada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah maju atau mapan. Dalam kelompok-kelompok yang menyandang masalah sosial sekalipun, modal sosial merupakan salah satu modal yang membuat mereka menjadi kuat dan dapat melangsungkan hidupnya.

c) Rasa Percaya (*Trust*)

Hasbullah mengatakan bahwa "rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung". Rasa percaya menjadi pilar kekuatan dalam modal sosial. Seseorang akan mau melakukan apa saja untuk orang lain kalau ia yakin bahwa orang tersebut akan membawanya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang ia inginkan (Hasbullah, 2006 : 11).

Rasa percaya dapat membuat orang bertindak sebagaimana yang diarahkan oleh orang lain karena ia meyakini bahwa tindakan yang disarankan orang lain tersebut merupakan salah satu bentuk pembuktian kepercayaan yang diberikan kepadanya. Rasa percaya tidak muncul tiba-tiba. Keyakinan pada diri seseorang atau sekelompok orang muncul dari kondisi terus menerus yang berlangsung secara alamiah ataupun buatan (dikondisikan). Rasa percaya

bisa diwariskan tetapi harus dipelihara dan dikembangkan karena rasa percaya bukan merupakan suatu hal yang absolut.

d) Norma Sosial

Norma-norma sosial merupakan seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang disepakati oleh anggota-anggota suatu komunitas untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam komunitas tersebut. Norma sosial berlaku kolektif. Norma sosial dalam suatu komunitas bisa saja sama dengan norma sosial di komunitas lain tetapi tidak semua bentuk perwujudan atau tindakan norma sosial bisa digeneralisir. Norma sosial mempunyai konsekuensi. Ketidaktaatan terhadap norma atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku menyebabkan seseorang dikenai sanksi. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma dapat berupa tindakan (hukuman) dan bisa berupa sanksi sosial yang lebih sering ditunjukkan dalam bentuk sikap, seperti penolakan atau tidak melibatkan seseorang yang melanggar norma, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas.

e) Nilai-nilai

Menurut Hasbullah, "nilai adalah suatu ide yang dianggap benar dan penting oleh anggota komunitas dan diwariskan secara turun temurun". Nilai-nilai tersebut antara lain mengenai etos kerja (kerja keras), harmoni (keselarasan), kompetisi dan prestasi. Selain sebagai ide, nilai-nilai juga menjadi motor penggerak bagi anggota-anggota komunitas. Nilai-nilai

kesetiakawanan adalah ide yang menggerakkan anggota komunitas untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Pada banyak komunitas, nilai prestasi merupakan tenaga pendorong yang menguatkan anggotanya untuk bekerja lebih keras guna mencapai hasil yang membanggakan (Hasbullah, 2006 : 14).

Menurut Andrain (dalam Setiadi, Kolip 2010:120) nilai-nilai memiliki enam ciri atau karakteristik, yaitu :

1. Umum dan abstrak, karena nilai-nilai itu berupa patokan umum tentang sesuatu yang dicita-citakan atau yang dianggap baik. Nilai dapat dikatakan umum sebab tidak ada masyarakat tanpa pedoman umum tentang sesuatu yang dianggap baik,patut, layak, pantas sekaligus sesuatu yang menjadi larangan atau tabu bagi kehidupan masing-masing kelompok. Pedoman tersebut dinamakan nilai sosial. Nilai sosial memiliki sifat abstrak, artinya nilai tidak dapat dilihat sebagai benda secara fisik yang dapat dilihat dengan mata, diraba, atau difoto. Sebab nilai sosial adalah pedoman tata kelakuan bersifat pokok yang keberadaannya adalah eksis dalam keyakinan masyarakat yang hanya dapat dijabarkan dalam bentuk perilaku umum oleh masyarakat tersebut.
2. Konsepsional, artinya bahwa nilai-nilai itu hanya diketahui dari ucapan-ucapan, tulisan, dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain.
3. Mengandung kualitas moral, karena nilai-nilai selalu berupa petunjuk

tentang sikap dan perilaku yang sebaiknya atau yang seharusnya dilakukan. Artinya moral manusia didalam kehidupan sangat berkaitan dengan nilai-nilai moralitas yang belaku didalam kelompok tersebut.

4. Dalam situasi kehidupan masyarakat yang nyata maka nilai itu akan bersifat campuran. Artinya, tidak ada masyarakat yang hanya menghayati satu nilai saja secara mutlak. Yang terjadi adalah campuran berbagai nilai dengan kadar dan titik berat yang berbeda.
5. Tidak selamanya realistik, artinya adalah bahwa nilai itu tidak akan selau dapat direalisasikan secara penuh didalam realitas sosial. Hal itu disebabkan oleh kemunafikan manusia, tetapi juga karena nilai-nilai itu merupakan hal yang abstrak sehingga untuk memahaminya diperlukan tingkat pemikiran dan penafsiran tertentu. Selain itu, nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat secara keseluruhan berbeda dengan nilai yang dihayati oleh individu. Atau bisa juga nilai yang dihayati oleh satu masyarakat dengan masyarakat lain memiliki karakter yang berbeda.
6. Cenderung bersifat stabil, sukar berubah, karena nilai-nilai yang telah dihayati telah melembaga atau mendarah daging dalam masyarakat. Perubahan akan terjadi jika struktur sosial berubah atau nilai-nilai baru timbul didalam struktur masyarakat tersebut.
7. Tindakan yang proaktif. Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk terlibat dan melakukan tindakan bagi kelompoknya adalah salah

satu unsur yang penting dalam modal sosial. Tindakan yang proaktif tidak terbatas pada partisipasi dalam artian kehadiran dan menjadi bagian kelompok tetapi lebih berupa kontribusi nyata dalam berbagai bentuk. Tindakan proaktif dalam konteks modal sosial dilakukan oleh anggota tidak semata-mata untuk menambah kekayaan secara materi melainkan untuk memperkaya hubungan kekerabatan, meningkatkan intensitas kekerabatan serta mewujudkan tujuan dan harapan bersama. Keterikatan yang kuat dan saling mempengaruhi antar anggota dalam suatu komunitas menjadi penggerak sekaligus memberi peluang kepada setiap anggota untuk bertindak proaktif. Tindakan proaktif juga dapat diartikan sebagai upaya saling membagi energi di antara anggota komunitas.

2. 3. Landasan Teori

Dalam teori ini digunakan *theory of practice* dari Pierre Bourdieu. Pierre F. Bourdieu (1930-2002) ialah sosiolog Perancis dan penulis yang dikenal karena pandangan politiknya yang vokal dan keterlibatannya dalam isu-isu dalam publik. Bourdieu adalah salah satu pemain terkemuka dalam kehidupan intelektual Perancis. Ia menjadi "referensi intelektual" bagi gerakan yang menentang neo-liberalisme dan globalisasi, yang berkembang di Perancis dan bagian dunia lain selama 1990-an.

Bourdieu menggunakan metode-metode yang diserap dari berbagai disiplin ilmu: dari filsafat dan teori sastra ke sosiologi dan antropologi. Ia

sangat dikenal karena bukunya, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, di mana ia berargumen bahwa penilaian-penilaian selera itu berhubungan dengan posisi sosial. Ia mengkombinasikan teori dan fakta-fakta yang bisa diverifikasi, dalam usaha mendamaikan kesulitan-kesulitan, semacam bagaimana memahami subyek di dalam struktur obyektif. Dalam proses itu, ia mencoba mendamaikan pengaruh dari dua hal –latar belakang sosial dan "pilihan bebas" terhadap individu. Ia merintis kerangka investigatif dan terminologi seperti modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik, serta konsep habitus, ranah (field) atau lokasi, dan kekerasan simbolik untuk mengungkapkan dinamika relasi kuasa dalam kehidupan sosial. Karyanya menekankan peran praktik dan perwujudan atau bentuk-bentuk (forms) dalam dinamika sosial dan konstruksi pandangan-dunia, yang sering bertentangan dengan tradisi filsafat Barat yang diuniversalkan.

2.3.1. Habitus, Doxa, dan Ranah

Bourdieu menerima perspektif Max Weber bahwa masyarakat tidak bisa dianalisis secara sederhana lewat kelas-kelas ekonomi dan ideologi semata-mata. Banyak karya Bourdieu berkaitan dengan peran independen dari faktor-faktor pendidikan dan budaya. Sebagai ganti analisis masyarakat lewat konsep kelas, Bourdieu menggunakan konsep ranah (field), yakni sebuah arena sosial di mana orang bermanuver dan berjuang, dalam mengejar sumberdaya yang didambakan. Sedangkan habitus dapat dirumuskan sebagai

sebuah sistem disposisi-disposisi (skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan bertahan lama). Agen-agen individual mengembangkan disposisi-disposisi ini sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi obyektif yang dihadapinya. Dengan cara ini, Bourdieu menteorikan penanaman struktur sosial obyektif ke dalam pengalaman mental dan subyektif dari si agen.

Doxa merupakan suatu nilai, ajaran, ideologi yang dikagumi dan ingin diperjuangkan untuk diwujudkan. Pada ranah tertentu/lokasi, aktor menjalin kuasa, demi dapat merealisasi hasrat/nafsu berkuasa untuk mencapai kekuasaan (ingin berkuasa),

Usaha Bourdieu mendamaikan yang obyektif (ranah) dan subjektif (habitus). Seperti disebutkan di atas, Bourdieu memanfaatkan konsep-konsep metodologis dan teoretis tentang habitus dan ranah, dengan tujuan untuk menciptakan jeda epistemologis dari antinomi obyektif-subyektif dalam ilmu-ilmu sosial yang terkenal itu. Ia secara efektif ingin menyatukan fenomenologi sosial dan strukturalisme. Bourdieu ingin mendamaikan antara yang material dan simbolik, kesadaran dan ketidaksadaran, kebebasan manusia dan keterikatan oleh struktur, serta ekonomi dan budaya. Bourdieu mencoba mempertemukan antara konsep dan praktik kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dan dengan demikian mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik, antara pikiran dan tindakan, serta antara ide dan realitas konkret.

Habitus dan ranah diajukan untuk menghasilkan jeda tersebut, karena keduanya hanya bisa eksis dalam relasi satu dengan yang lain. Walau sebuah ranah itu dibentuk oleh berbagai agen sosial yang berpartisipasi di dalamnya (dan dengan demikian, di dalam habitus), sebuah habitus –sebagai dampaknya— merepresentasikan transposisi struktur-struktur obyektif dari ranah tersebut ke dalam struktur subyektif tindakan dan pikiran sang agen. Hubungan antara habitus dan ranah adalah relasi dua-arah. Ranah hanya bisa eksis sejauh agen-agen sosial memiliki kecondongan-kecondongan dan seperangkat skema perseptual, yang dibutuhkan untuk membentuk ranah itu dan mengaruniainya dengan makna. Seiring dengan itu, dengan berpartisipasi dalam ranah, agen-agen memasukkan pengetahuan (know-how) yang memadai ke dalam habitus mereka, yang akan memungkinkan mereka membentuk ranah. Habitus mewujudkan struktur-struktur ranah, sedangkan ranah memperantarai antara habitus dan praktik.

Bourdieu menegaskan bahwa setiap riset harus terdiri dari dua rincian. Yang pertama adalah tahap obyektif riset –di mana kita melihat relasi-relasi pada ruang sosial dan struktur-struktur ranah. Sedangkan tahap kedua harus merupakan analisis subyektif terhadap disposisi-disposisi agen sosial untuk bertindak, serta kategori-kategori persepsi dan pemahaman yang muncul dari kesertaan (inhabiting) di dalam ranah. Riset

yang memadai, menurut Bourdieu, tidak dapat dilakukan tanpa keberadaan dua hal tersebut bersamaan.

Melalui teori Habitusnya, Bourdieu menunjukkan bagaimana relasi kuasa terjadi dalam struktur masyarakat tertentu. Namun lewat konsep Habitus itu, terlihat bahwa realitas sosial tidaklah begitu sederhana seperti penjelasan lewat teori pertentangan kelas, yang terlalu mengutamakan faktor ekonomi dan mengabaikan faktor-faktor lain. Ia juga telah menunjukkan bahwa pendekatan oposisi agensi versus struktur sudah tidak lagi memadai, dalam menjelaskan realitas sosial. Jadi, Bourdieu menolak pandangan Cartesian yang membedakan secara jelas antara subjek dengan dunia luar, antara agensi dan struktur. Memang ada relasi atau keterkaitan antara keduanya, namun hubungan itu bersifat dinamis, kompleks, saling mempengaruhi, dan tidak linier, untuk menghasilkan praktik sosial.

Untuk masyarakat Indonesia, pemikiran Bourdieu ini bermanfaat significant dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya, ekonomi dan politik yang ada di masyarakat. Kita juga perlu melihat secara kritis terjadinya represi dan kekerasan simbolik, yang dilakukan oleh rezim atau kelompok yang berkuasa terhadap masyarakat kelas bawah, yang terpinggirkan dalam proses "pembangunan."

Jika dikaitkan istilah trajectory yang dikemukakan Latour dan apa

yang disebut oleh Bourdieu dengan habitus, tampak ada kesamaan atau keterkaitan.

> *"Bourdieu is the locus of the inculcation and development of an individual's habitus, it's the educational institution whose task it's to transmit consciously this system of unconscious schemes* (Bourdieu, 1977:77). *The School"s express function is „to transform the collective heritage into an individual and common unconscious"* (Bourdieu, 1969:118).

Habitus merupakan internalisasi norma, pemahaman, serta pola tingkahlaku, yang menyebabkan perbedaan antara kelompok satu dengan lainnya (Pamerdi, 2009: 18). Habitus juga merupakan penentu tindakan sosial dari aktor. Dengan demikian setiap aktor memperoleh sejarah pembentuk diri dari jaringan pada satu sisi, namun bersamaan dengan itu aktor tersebut menjadi salah satu bagian dengan peranan di dalam proses pembentukan institusi jaringan. Menurut Bourdieu, aktor dalam keterlibatannya baik dalam jaringan sosial maupun dalam ruang "wilayahnya" akan berjuang dan melakukan strategi guna mencapai posisi tertinggi dengan berbagai cara.

Menurut Bourdieu, habitus merupakan penentu tindakan sosial dari aktor. Dalam artian, habitus dipandang sebagai sesuatu yang statis. Akan tetapi timbul sebuah pertanyaan berkaitan dengan aktor yang kerap diperhadapkan dengan perubahan sosial politik yang bergerak secara dinamis dalam masyarakat. "Akankah aktor semata-mata bertindak

berdasarkan habitusnya?" Aktor mempunyai kelebihan guna melakukan respon atas perubahannya, dan aktor hanya memerlukan adanya *self creation* untuk menyikapi perubahan tersebut.

2.3.2. Modal Simbolik

Menurut Karl Marx, "modal (capital) bukanlah relasi sederhana, melainkan sebuah proses, di dalam mana berbagai gerakan adalah selalu (berupa) modal." Bourdieu melihat *symbolic capital* atau modal simbolik (seperti: harga diri, martabat, atensi) merupakan sumber kekuasaan nan krusial. Modal simbolik merupakan setiap spesis modal yang dilihat melalui skema klasifikasi, dan ditanamkan secara sosial. Tatkala pemilik modal simbolik menggunakan kekuatannya, hal ini diperhadapkan dengan agen yang mempunyai kekuatan lebih lemah, karena itu agen akan berupaya merubah tindakannya. Maka, hal ini memperlihatkan terjadinya kekerasan simbolik (*symbolic violence*).

Pada dasarnya, kekerasan simbolik merupakan pemaksaan kategori pemikiran serta persepsi terhadap dominasi agen sosial, yang lalu menganggap tatanan sosial sebagai suatu yang "adil." Ini merupakan penggabungan struktur secara tidak sadar, yang acapkali mengulang struktur tindakan dari dominasi suatu pihak. Pihak yang terdominasi lalu melihat posisi pihak yang dominan sebagai yang "benar." Dalam arti tertentu, kekerasan simbolik jauh lebih kuat daripada kekerasan fisik, hal

ini karena kekerasan simbolik melekat pada setiap bentuk tindakan dan struktur kognisi individual, dan menjadi momok yang memaksakan legitimasi pada tatanan sosial.

Bourdieu melalui tulisan teoretisnya, menggunakan beberapa istilah ekonomi guna melakukan analisis proses reproduksi sosial dan budaya, tentang bagaimana pelbagai bentuk modal kerap ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagian kunci proses ini merupakan bentuk transformasi dari warisan simbolik atau ekonomi seseorang (misal : aksen atau kepemilikan harta) menjadi modal budaya (seperti: pendidikan) –suatu proses di mana logika ranah budaya mampu merintangi atau menahan, namun tak mampu ditangkal.

Berdasarkan pemikiran Pierre Bourdieu di atas, ada empat modal yang menjadi taruhan untuk sebuah arena, yakni modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik. Bagi Bourdieu, sebuah modal memiliki fungsi relasi sosial dalam sistem pertukaran, yang mempresentasikan dirinya kepada sesuatu yang langka. Keragaman jenis modal tersebut dipertukarkan dengan berbagai modal lainnya. Pertukaran paling dramatis adalah pertukaran berbentuk simbolik. Karena pada bentuk ini, bentuk modal yang berbeda dipersepsikan serta dikenali sebagai sesuatu yang mudah dilegimitimasi.

Modal ekonomi, berkait dengan materil (memiliki nilai simbolik)

dan pelbagai atribut yang tidak tersentuh, tetapi memiliki signifikansi secara kultur, misal prestise, otoritas, dan status, (dirujuk sebagai modal simbolik).

Modal budaya didefinisikan sebagai cita rasa bernilai budaya serta pola konsumsi. Modal budaya secara luas mencakup properti, seperti : pendidikan, seni, dan bentuk-bentuk bahasa. Modal bagi Bourdieu memiliki peran sebagai relasi sosial yang di dalamnya memiliki sistem pertukaran. Istilah ini lalu mengalami perluasan pada beragam bentuk barang : materi maupun simbol, tanpa membedakan, yang mempresentasikan dirinya sebagai suatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Modal simbolik merujuk pada tingkatan akumulasi prestise, populer, konsekrasi atau kehormatan, serta di atasnya dibangun dialektika pengetahuan dan pengenalan. Memang modal simbolik tak terlepas dari kekuasaan simbolik, yakni kekuasaan yang memungkinkan memperoleh kesetaraan atas apa yang didapatkan atas kekuasaan fisik dan ekonomi, sebagai akibat khusus dari mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa pengaruh, status atau prestise.

Modal sosial terimplementasi lewat relasi serta jaringan relasi yang menjadi sumber daya dan berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial. Modal sosial atau jaringan sosial ini dimiliki pelaku

dalam hubungannya dengan pihak lain yang mempunyai kuasa.

---------[]---------

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG